



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AMIRULLAH**
2. Jabatan : **KEPALA SEKRETARIAT**
3. NHK : **523905**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **4.124.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1160 m2/21 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 580.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m2/80 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 54 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 55.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1339 m2/300 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 1.709.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 10260 m2/10260 m2 di KAB / KOTA ACEH JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 7134 m2/7134 m2 di KAB / KOTA ACEH JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **255.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI IGNIS 1.2 GL MT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11B1C Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000



3. MOTOR, HONDA X1BO2R07L0 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000

4. MOBIL, TOYOTA AGYA 1,2 G A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 54.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.215.121

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.463.715.121

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.463.715.121

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.